



**STRATEGI OPTIMALISASI STANDAR KINERJA UMKM
SEBAGAI KATALIS PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI
MIDDLE INCOME TRAP 2045**

Belinda Azzahra dan I Gede Angga Raditya Prasadha Wibawa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

email korespondensi: belindaqzzahra22@gmail.com

ABSTRAK

Realisasi kontribusi Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) pada tahun 2018 kepada PDB Indonesia mencapai 60,34 persen. Namun sayangnya, kontribusi yang telah diberikan oleh UMKM belum mencapai angka yang maksimum. Lebih dari 40% UMKM di Indonesia masih mengalami permasalahan dasar mulai dari pembiayaan hingga pemasaran yang menghambat mereka untuk bisa mengakselerasi pertumbuhan bisnis UMKM secara signifikan. Selain itu, Permasalahan fundamental lainnya ialah saat pendirian UMKM, ide bisnis yang digunakan cenderung sudah terlambat dan didahului oleh bisnis pesaing yang sudah *sustain*, ditambah lagi ketidakmerataan sektor usaha serta tidak adanya standar kinerja UMKM yang menjadi pedoman mereka dalam beroperasi mencapai target. Sehingga strategi bisnis dan operasional hanya terbawa arus yang menyebabkan tren pertumbuhan ekonomi UMKM berlangsung secara stagnan kemudian menurun. Di sisi lain, *middle income trap* sebagai jebakan yang tak kasat mata menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan para pelaku UMKM di Indonesia. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, penulis mengusulkan rekomendasi kebijakan yaitu strategi optimalisasi standar kinerja bagi UMKM dalam ruang lingkup operasional, finansial, dan sumber daya manusia. Dalam strategi tersebut, penulis membagi tahapan standar menjadi tiga bagian dengan menggunakan *hexagon linkage* sebagai penghubung antar pemangku kepentingan terkait sebagai motor penggerak sekaligus pengawas dalam pengembangan UMKM yang ada. Dengan demikian, melalui strategi yang lebih bertahap dan bersifat diharapkan dapat menjadi solusi bagi UMKM untuk mampu meningkatkan daya saing dan efektifitas kinerja UMKM sehingga dapat menjadi katalis roda perekonomian di Indonesia untuk keluar dari *middle income trap*.

Kata Kunci : UMKM, *Middle Income Trap*, *hexagon linkage*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

UMKM digadang-gadang menjadi sumbu perekonomian di Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global. Pada Tahun 2014-2016 jumlah UMKM di Indonesia lebih dari 57.900.000 unit dan pada tahun 2017 jumlah UMKM diperkirakan berkembang lebih dari 59.000.000 unit. Pada Tahun 2016, Presiden RI menyatakan UMKM yang memiliki daya tahan tinggi akan mampu untuk menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global. UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8-99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2%. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit.

Oleh karena itu, kerja sama untuk pengembangan dan ketahanan UMKM perlu diutamakan. Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Menurut data Bank Indonesia, setiap tahunnya kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan. Walaupun pada 2015, sekitar 60%-70% dari seluruh sektor UMKM belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan. Selain itu pula, banyak permasalahan fundamental dan operasional lain yang dihadapi UMKM di Indonesia tanpa mendapatkan solusi kebijakan yang efisien dari pemangku kepentingan terkait.

Pada sisi lain, salah satu tantangan terbesar yang menghantui masa depan bangsa Indonesia dalam upayanya meraih cita-cita luhur kemerdekaan adalah ancaman *Middle Income*

Trap (MIT). Bank Dunia pada tahun 2012 menyatakan bahwa dari 101 negara yang tergolong *middle income countries* pada 1960 hanya 13 negara saja yang kemudian mampu keluar dari jebakan MIT. Sedikit negara yang mampu keluar dari jebakan ini seperti Singapura, Taiwan dan Korea Selatan. Tolok ukur suatu negara dikatakan negara berpendapatan rendah jika pendapatan per-kapitanya kurang dari USD 1.005, negara berpendapatan menengah-bawah jika pendapatan per-kapitanya USD 1.006 - 3.975, negara berpendapatan menengah-atas jika pendapatan per-kapitanya USD 3.976 - 12.275 dan negara maju jika pendapatan per-kapitanya di atas USD 12.276.

Pada 2016, pendapatan nasional per-kapita Indonesia hanya sekitar 36,38 juta rupiah atau sekitar USD 2.734,62. Berdasarkan kategori di atas, Indonesia termasuk ke dalam negara berpendapatan menengah-bawah dan memiliki potensi cukup tinggi untuk terjebak menjadi negara berpendapatan menengah. Selama 2010-2016 rata-rata pertumbuhan pendapatan nasional per-kapita Indonesia adalah sekitar 8,66 persen. Jika angka ini konsisten, maka artinya Indonesia memerlukan waktu sekitar 18 tahun untuk menjadi negara maju yang berpenghasilan USD 12.276 dengan asumsi bahwa kondisi secara makro dan global *favorable* bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ancaman MIT ini sebenarnya bisa ditanggulangi Indonesia dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi yang sedang berlangsung dan diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030. Agar Indonesia menjadi negara maju pada tahun dimana bonus demografi mencapai puncaknya yaitu 2030

maka pertumbuhan pendapatan nasional per-kapita Indonesia secara rata-rata harus minimal berada pada nilai 11,32 persen untuk 14 tahun mendatang. Suatu pencapaian yang ambisius mengingat dalam kurun waktu 7 tahun terakhir pendapatan nasional per-kapita hanya rata-rata sebesar 8,66 persen.

Peningkatan pendapatan nasional per-kapita ini harus dimotori oleh paket program pembangunan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yaitu melalui optimalisasi kinerja UMKM. Sehingga, UMKM harus bisa meningkatkan standar kinerja dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara *rapid*. Oleh karena itu pula, dibutuhkan suatu solusi konkret yang memberikan implementasi nyata dari proses operasional UMKM, hingga kontrol internal UMKM tersebut.

Sasaran Penelitian

Penelitian ini memiliki 3 sasaran utama (*triple helix*) yaitu :

- Pemerintah; sebagai pemangku kepentingan utama dalam merumuskan dan mengesahkan strategi negara khususnya dalam upaya pengembangan UMKM sebagai bentuk upaya keluar dari *Middle Income Trap* 2045.
- UMKM dan Swasta; sebagai pelaku utama dalam implementasi kebijakan dan pengembangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk menjadikannya sebagai tameng perekonomian Indonesia.
- Masyarakat Sipil; sebagai pendukung utama kegiatan operasional UMKM di Indonesia serta sebagai *potential market* bagi UMKM di Indonesia untuk bisa tumbuh dan berkembang menuju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih *rapid*.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam menyusun implementasi strategi optimalisasi kinerja UMKM yang lebih efisien dan efektif dengan pemanfaatan optimum di semua bidang operasional UMKM. Selain itu, dalam jangka panjang, strategi ini diharapkan dapat membawa UMKM keluar dari *Middle Income Trap* sebagai kunci utama upaya semua pemangku kepentingan dalam menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat antara lain :

- Dapat menjadi acuan bagi pemerintah maupun UMKM di Indonesia dalam mengupayakan peningkatan kinerja operasional maupun fundamental
- Dapat menjadi rekomendasi strategi bagi UMKM untuk meningkatkan kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia
- Dapat menjadi *draft plan* bagi pemangku kepentingan terkait dalam menyusun strategi nyata bagi pengembangan UMKM di Indonesia khususnya dalam keluar dari *Middle Income Trap* 2045.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep UMKM di Indonesia

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. 1 Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
- c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian ke depan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM, berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.

Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.

- c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
- d. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
- e. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan.

Klasifikasi UMKM di Indonesia

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka, sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan

melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

Peranan UMKM di Indonesia

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia pun memandang penting keberadaan para pelaku UMKM. Buktinya, UMKM bersama dengan Koperasi memiliki wadah secara khusus di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Perhatian tinggi yang diberikan kepada para pelaku UMKM tersebut tidak lain sebagai wujud pemerintah dalam menyangga ekonomi rakyat kecil. Apalagi, UMKM mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di sektor bawah. Setidaknya, ada 3 peran UMKM yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil. Tiga peran tersebut adalah:

- Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan Peran UMKM penting yang pertama adalah sebagai sarana mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan. Alasan utamanya adalah, tingginya angka penyerapan tenaga kerja

oleh UMKM. Hal ini terbukti dalam data milik Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2011. Disebutkan, lebih dari 55,2 juta unit UMKM mampu menyerap sekitar 101,7 juta orang. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 57,8 juta unit UMKM dengan jumlah tenaga kerja mencapai 114 juta orang.

- Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil.

UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat. Termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman sekalipun. Keberadaan UMKM di 34 provinsi yang ada di Indonesia tersebut memperkecil jurang ekonomi antara yang miskin dengan kaya. Selain itu, masyarakat kecil tak perlu berbondong-bondong pergi ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak.

- Memberikan pemasukan devisa bagi negara
Peran UMKM berikutnya yang tidak kalah penting adalah, memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa. Saat ini, UMKM Indonesia memang sudah sangat maju. Pangsa pasarnya tidak hanya skala nasional, tapi internasional. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2017 menunjukkan tingginya devisa negara dari para pelaku UMKM. Angkanya pun sangat tinggi, mencapai Rp88,45 miliar. Angka ini mengalami peningkatan hingga delapan kali lipat dibandingkan tahun 2016.

Perkembangan UMKM di Indonesia

Berbicara mengenai usaha di Indonesia sendiri saat ini usaha mikro, kecil dan menengah atau biasanya disingkat (UMKM) saat ini sudah

mulai berkembang. Walaupun UMKM di Indonesia ini masih terbilang kecil dalam skala internasional akan tetapi dikutip dari Kemenkeu.go.id di Indonesia sendiri UMKM mampu menyumbang 60,3 produk domestik bruto (PDB) dan 97% tenaga kerja. Dengan perkembangan UMKM di Indonesia saat ini telah membantu pemerintah di Indonesia untuk bisa menciptakan lapangan kerja bagi pengangguran. Selain itu perkembangan UMKM di Indonesia juga telah membantu meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga di Indonesia. Potensi UMKM yang begitu besar ini disinyalir sebagai salah satu kunci Indonesia untuk bisa keluar dari *Middle Income Trap*. Dengan meningkatkan pertumbuhan UMKM secara *rapid*, pemerintah mengharapkan output maksimum yaitu sebagai salah satu kunci dalam keluar dari jeratan *middle income trap*.

Penelitian Terdahulu sebagai *Benchmark* Kinerja UMKM secara Internasional

Industri Jepang yang meningkat pesat sejak 1960 mempengaruhi kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi Negara Amerika Serikat, wilayah Asia bahkan dunia (Barra, 1986). Perkembangan ilmu Jepang dan keberhasilan dalam teknologi, serta produktivitas yang tinggi berkaitan dengan konsep perbaikan berkelanjutan Jepang yang dikenal dengan istilah Kaizen. Salah satu disiplin kerja Jepang yang merupakan bagian Kaizen adalah Gerakan 5S yaitu gerakan kebulatan tekad di tempat kerja untuk mengadakan pemilahan, penataan, pembersihan, dan pemeliharaan kondisi kerja untuk melaksanakan kebiasaan kerja yang baik. 5S adalah huruf pertama istilah Jepang, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke, yang menjadi semboyannya (Oshada, 2000). Amerika Serikat, Amerika Selatan,

Eropa dan Asia Tenggara menyadari bahwa prinsip-prinsip umum kerja Jepang bersifat universal dan dapat diterima sebagian besar negara di seluruh dunia (Barra, 1986).

Saat ini, konsep disiplin kerja Jepang terutama dalam hal prinsip kerja 5S mulai diadopsi negara-negara maju dan berkembang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Sektor penting perkembangan dunia usaha di Indonesia adalah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Penelitian penerapan 5S studi kasus di luar negeri seperti India, Malaysia, dan Inggris memadukan teori 5S dengan beberapa metode seperti LSS (*Lean Six Sigma*), Lean Manufacturing, TQM (*Total Quality Management*), *Seven Steps* dan *Seven tools Method*. *Lean manufacturing* dan *Six Sigma* sebagai metodologi produksi bertujuan mengurangi *waste* atau pemborosan, penyederhanaan prosedur dan mempercepat operasi yang memungkinkan organisasi untuk mampu menerapkan 5S dalam organisasi (Harry dan Crawford, 2005). Studi lain mengenai penerapan 5S, memadukannya dengan konsep Lean Manufacturing dan mengatakan bahwa konsep tersebut tepat dipraktikkan bersama dengan penerapan 5S (Badurdeen, 2007).

Prinsip Lean berfokus pada menghilangkan pemborosan baik waktu tunggu, persediaan, mengurangi ukuran lot atau *batch*, Arus produksi maupun siklus proses (Jones dan Womack, 1996). Imai (1998) mengatakan bahwa berbagai praktik manajemen seperti Total Quality Control (TQC), Zero Defect, just-in-time (JIT), Gugus Kenali Mutu dan manajemen kualitas Jepang lainnya merupakan konsep Kaizen. Penerapan 5S yang merupakan bagian dari perbaikan berkesinambungan (Kaizen) bertujuan untuk perbaikan kualitas dan sistem kerja dalam sebuah organisasi. Penelitian

lain membahas penerapan 5S dalam SME (Small Medium Enterprise) menggunakan metode Seven Tools dan Seven Steps yang merupakan bagian dari TQM (Total Quality Management). Tujuh alat tahapan dasar (*Seven Steps*) dalam sistem manajemen mutu berkaitan erat dengan prinsip perbaikan terus-menerus menggunakan tujuh alat kualitas dasar (*Seven tools*). Metode ini mengumpulkan, menganalisis, memvisualisasikan dan menentukan solusi perbaikan dengan langkah sistematis untuk peningkatan kualitas (Mirko, 2009).

METODOLOGI PENELITIAN

Perspektif Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu langkah penyelesaian masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Jenis dan Sumber Data

Seluruh analisis dijelaskan dengan menggunakan metode studi pustaka melalui data sekunder. Sumber dari studi pustaka ini bervariasi dari artikel, buku, dan jurnal yang berasal dari media internasional maupun nasional. Data-data yang diambil merupakan data yang valid karena diambil dari sumber terpercaya yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak melupakan kaidah ilmiah. Peneliti memakai pendekatan kualitatif dengan data sekunder dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Teknik analisis data

Dalam karya tulis ini, penarikan kesimpulan menggunakan teknik induktif. Fakta-fakta dan data akurat yang didapatkan akan dijabarkan

di area pembahasan, lalu akan ditarik beberapa poin kesimpulan berdasarkan poin pembahasan tersebut. Kesimpulan yang ditarik merupakan poin umum yang menghubungkan 1 poin pembahasan ke poin pembahasan lainnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hexagon Linkage : Optimalisasi Kinerja UMKM dari perspektif Operasional

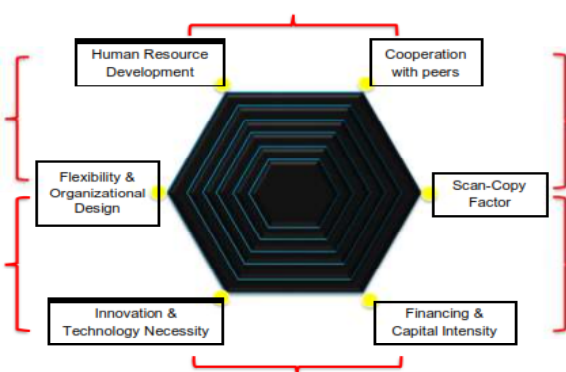
Saat ini, dunia bisnis menjadi dunia yang sangat dinamis, namun di sisi lain juga disruptive terhadap penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sehingga apabila kita mengharapkan agar kinerja UMKM dapat berkembang hingga ke tingkat dimana UMKM dapat membawa Indonesia menembus *Middle Income Trap*, maka kita perlu melakukan optimalisasi kinerja UMKM melalui perspektif yang lebih relevan namun disaat yang bersamaan aplikatif bagi para pelaku UMKM secara umum. Oleh karena itu kami mengajukan solusi yakni *Hexagon Linkage* sebagai perspektif baru dalam menilai oportunitas dan optimalisasi operasional UMKM baik yang telah berdiri maupun UMKM Potensial yang mungkin akan berkembang.

Terdapat enam komponen yang dapat memengaruhi kinerja UMKM dan menciptakan *best practice* bagi para pelaku UMKM yang pada akhirnya akan menciptakan *business behaviour* yang menjadi petunjuk bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan, baik dari sisi pemerintah dalam menyiapkan regulasi yang lebih kompatibel maupun investor yang ingin menanamkan modalnya pada UMKM. Komponen tersebut di antaranya adalah :

1. Inovasi dan Kebutuhan Teknologi
Tingkat inovasi dan kebutuhan teknologi yang berbeda antar pelaku UMKM
2. Intensitas Permodalan
Kebutuhan modal antara pelaku UMKM

dengan pelaku usaha yang lain tentu berbeda, hal ini disebabkan karena: perbedaan industri, strategi produksi, jenis produk

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tingkat sumber daya manusia yang dapat diukur secara kualitas dan kuantitas akan memiliki pengembangan yang berbeda bagi para pelaku UMKM
4. Fleksibilitas dan Desain Organisasi
Fleksibilitas merupakan langkah-langkah praktis dan fleksibel yang digunakan oleh perusahaan dalam mengambil keputusan yang bersifat jangka pendek dan menengah. Sedangkan desain organisasi mencerminkan pengembangan divisi yang ada, *span of control*, serta proses pengambilan keputusan pada UMKM
5. Kerjasama antar Pelaku UMKM
Kerjasama merupakan kegiatan yang bersifat mutualisme dan telah disepakati oleh UMKM dengan pihak terkait, semisal supplier bahan baku, agen produk, maupun sesama UMKM
6. *Scan-Copy Factor*
Scan-Copy Factor menunjukkan kemampuan suatu UMKM untuk menjadi role model dalam suatu usaha yang nantinya ide serta cara kerjanya dapat atau tidak untuk ditiru oleh pelaku UMKM lain



Gambar 1 Role Model UMKM

Dari *linkage* atas setiap faktor tersebut, *business behaviour* yang telah terbentuk akan menciptakan cerminan terkait dimana letak optimalisasi kinerja yang terbaik bagi pelaku UMKM.

Skema Kontrol Internal UMKM dengan memerhatikan *Budget-Effect Control*

Di dalam suatu organisasi maupun bisnis, seorang pemimpin dapat memberikan pengawasan kepada para pekerjanya secara langsung, namun semakin besar suatu entitas, tentu saja penyampaian informasi dan koordinasi menjadi lebih kompleks. Sehingga suatu sistem kontrol internal perlu dibentuk dan dilakukan oleh setiap jenis dan ukuran badan usaha untuk meminimalkan risiko manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Permasalahan muncul ketika para pelaku UMKM menganggap sepele kontrol internal ataupun terhalang oleh adanya keterbatasan biaya dan *cost-benefit analysis* yang memberikan sinyal negatif atas implementasi kontrol internal pada kegiatan usaha UMKM. Sehingga terjadi *budget-effect* atau efek biaya yang belum dapat dikontrol oleh para pelaku UMKM saat mencoba implementasi kontrol internal. *Budget-effect* terjadi jika terdapat *mismatch* antara kebutuhan yang diharapkan dengan biaya yang telah atau harus dikeluarkan oleh suatu entitas atau individu. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor informasi yang asimetris, tingkat dan kemampuan sumber daya yang berbeda, serta kesalahan prosedur dalam pelaksanaan yang ideal. Oleh karena itu pelaku UMKM harus tahu benar terkait komponen kontrol internal, tujuan implementasinya, serta Standar prosedur yang ideal. Hal ini dapat dipelajari melalui *Internal Control Integrated Framework cube* pada Gambar 2 berikut



Gambar 2 *Internal Control Integrated Framework cube*

Dari kubik 3 dimensi tersebut dapat kita lihat bahwa memang dari segi manfaat dan prosedur yang ada terlalu kompleks dan tidak menguntungkan bagi para pelaku UMKM untuk menerapkannya. Namun layaknya sebuah kue yang besar, kita tidak perlu memakan semuanya bulat-bulat, kita dapat sisihkan bagian apa saja yang kita inginkan. Sehingga penulis berpendapat bahwa perlu adanya persiapan skema yang lebih sederhana namun efektif bagi para pelaku UMKM dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

Membentuk *Sustainable Peers Relationship* antar UMKM

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan suatu entitas bisnis tidak luput dari peran “rekan bisnis”nya yang dalam waktu bersamaan dapat pula menjadi “kompetitor” dalam suatu industri yang sama. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Adanya keinginan untuk menjadi bisnis yang sustainable sekaligus profitable
2. Benchmarking dan terbuka atas perkem-

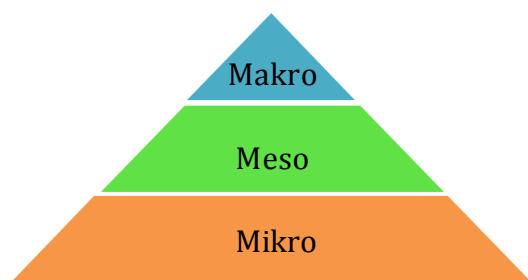
bangunan hal-hal dan teknologi baru untuk mendorong pertumbuhan perusahaan

3. Kesamaan tujuan dengan cara kerja yang berbeda ataupun sebaliknya

Dimana, apabila perilaku yang sama diterapkan oleh para pelaku UMKM, maka dapat dipastikan bahwa adanya pembentukan *intentional peers* akan memberikan dampak yang lebih baik dikarenakan telah memiliki mutual agreement antar anggota peers. Sehingga akan menciptakan adanya hubungan yang bersifat berkelanjutan antar pelaku UMKM.

Level Expected Impact dari Usulan Strategi Solusi

Setelah menganalisis optimalisasi kinerja menggunakan *Hexagon Linkage*, lalu merumuskan skema kontrol internal, dan memberikan rekomendasi UMKM untuk membangun *sustainable peers relationship* tentunya ada berbagai *impact* yang diharapkan atas dasar peningkatan pertumbuhan perekonomian UMKM dalam menuju visi besar Indonesia, sukses keluar dari *Middle Income Trap* di tahun 2045. Pengaruh yang diharapkan dapat terbagi menjadi 3 level ruang lingkup yaitu, level mikro, meso dan makro



Gambar 3. Level Expected Impact

Dari level mikro, diharapkan pengaruh positif yang ditimbulkan dapat meningkatkan kinerja di ruang lingkup UMKM itu sendiri. *Expected Impact* di level mikro antara lain :

- Dari segi manajemen operasional, UMKM dapat mengimplementasikan asas-asas operasional yang lebih efisien dan efektif, namun tetap *bearing with cost*.
- Dari segi manajemen sumber daya manusia, UMKM diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan melakukan berbagai pelatihan internal maupun eksternal, serta melakukan konsultasi yang intensif ke UMKM yang lebih baik dari segi pelatihan sumber daya.
- Dari segi manajemen keuangan, UMKM diharapkan dapat terlebih dahulu mengerti struktur keuangan UMKM lalu merancang permodalan yang *suitable* bagi operasional perusahaan.

Dari segi Meso, diharapkan pengaruh positif yang ditimbulkan dapat meningkatkan kinerja UMKM dalam berhubungan dengan UMKM lainnya secara berkesinambungan dan berkelanjutan. *Expected Impact* di level meso antara lain:

- Terjalannya hubungan antar UMKM yang harmonis, dalam artian saling membantu satu sama lain dalam bidang operasional, keuangan, dan manajemen sumber daya.
- Membangun kerja sama yang inklusif dan berkelanjutan agar antar UMKM satu dengan yang lainnya dapat saling menopang ketika salah satunya dihadapkan oleh permasalahan fundamental maupun operasional.

Dari segi Makro, diharapkan pengaruh positif yang ditimbulkan oleh kemajuan UMKM secara ruang lingkup besar dapat berkontribusi dengan level nasional.

Expected Impact di level makro antara lain:

- Peningkatan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara

nasional sebagai salah satu bentuk upaya keluar dari jeratan *Middle Income Trap*

- Kemajuan UMKM yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam ikut terjun membangun perekonomian bangsa.

PENUTUP

Kesimpulan

Menyadari bahwa Indonesia saat ini dihadapkan pada beberapa risiko ketidakpastian ekonomi global, salah satunya ialah *Middle Income Trap* di tahun 2045, Indonesia memerlukan tameng ekonomi yang cukup kuat untuk keluar perangkap tersebut. Salah satu bentuk tamengnya ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya kemandirian domestik melalui UMKM. Akan tetapi, perkembangan UMKM saat ini dirasa belum maksimal dan masih dipandang sebelah mata karena inefisiensi baik dari segi permodalan hingga sumber daya manusia. Oleh karena itu, solusi dalam paper ini hadir untuk mengoptimalkan kinerja UMKM dari per-bidang operasional. Selain itu, penulis melihat beberapa kekurangan dari sistem UMKM yaitu dari segi kontrol internal, termasuk di dalamnya *cost-budget effect*. Melalui sistem kontrol internal yang lebih terintegrasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan partisipasi dari beberapa pemangku kepentingan lainnya, skema yang kami buat dapat meningkatkan efisiensi kerja dan pengawasan UMKM di Indonesia. Diharapkan kedepannya para pelaku UMKM dapat meningkatkan kesejahteraannya dalam rangka memperkuat sektor ekonomi nasional, lewat pasar domestik. Selain itu, diharapkan dengan meningkatnya kualitas UMKM Indonesia, UMKM juga tidak akan kalah dari perusahaan asing di era global.

Saran

Penulis menyadari bahwa strategi optimalisasi UMKM ini masih memiliki beberapa kekurangan dalam penerapannya pada masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diharapkan nantinya program ini dapat terus dikembangkan dan mengevaluasi sistem yang telah diciptakan serta senantiasa berinovasi setiap menemukan kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan nantinya. Selain itu, sebaiknya pemerintah serta pemangku kepentingan lain yang terkait dapat turut membantu dan berkolaborasi dalam mewujudkan standar kinerja UMKM Indonesia yang lebih efisien dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, F. D. 2013. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1286-1295.
- Anggraini, D., & Nasution, S. H. 2013. Peranan kredit usaha rakyat (KUR) bagi pengembangan UMKM di Kota Medan (studi kasus Bank BRI). *Ekonomi dan Keuangan*, 1(3).
- Chrismardani, Y. 2014. Komunikasi pemasaran terpadu: implementasi untuk UMKM. *Neo-Bis*, 8(2), 179-189.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18.

- Narsa, I. M., Widodo, A., & Kurnianto, S. 2012. Mengungkap kesiapan UMKM dalam implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (PSAK-ETAP) untuk meningkatkan akses modal perbankan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga (JEBA)/ Journal of Economics and Business Airlangga*, 22(3).
- Rudiantoro, R., & Siregar, S. V. 2012. Kualitas laporan keuangan umkm serta prospek implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 1-21.
- Suci, Y. R. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Sudaryanto, R., & Wijayanti, R. R. 2013. Strategi pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas Asean. *Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan, Jakarta*.
- Susilo, Y. 2012. Strategi meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi implementasi CAFTA dan MEA. *Buletin Ekonomi*.
- Tambunan, T. 2012. UMKM Indonesia. *BUKU DOSEN-2014*.
- Tedjasuksmana, B. 2014. Potret UMKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
